

Penerapan Smart Governance di Desa guna mewujudkan Smart Village

Vol 7 Issue 2
(Oktober, 2023)

Santi Oktavia^{1*}, Simon Sumanjoyo Hutagalung², Ita Prihantika^{3*}
¹²³ Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung
Email: sanntovia@gmail.com¹, mon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id²,
itaprihantika@fisip.unila.ac.id^{3*},

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx
Revised version received: xxx
Accepted: xxx
Available online: xxx

Keywords:

Implementation; Smart Governance; Smart Village;

How to Cite:

APA Style 7th



ABSTRACT

This research aims to find out how smart governance is implemented in the context of smart villages in Pekon Sukanegeri Jaya and the factors that influence the implementation of smart governance. The research method is carried out with a descriptive qualitative approach based on the concept of smart governance according to Cohen which includes 3 dimensions, namely Enabling Supply & Demand Side Policy, Transparency & Open Data, and ICT & E-Gov. The research results showed that the implementation of smart governance in Pekon Sukanegeri Jaya was carried out well. However, there are still several things that need to be improved, namely active participation from the community. There are 4 factors that influence the implementation of smart governance in Pekon Sukanegeri Jaya, namely funding, social capital, networking and collaboration, and community participation.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2023 by IJGCS

1. Pendahuluan

Desa merupakan unit terkecil dalam tata kelola pemerintahan yang menjadi komponen penting dalam menggerakkan masyarakat Indonesia. Berbagai permasalahan yang ada di desa hendaknya menjadi perhatian pemerintah, salah satunya adalah permasalahan pembangunan desa. Secara administratif jumlah desa hingga tahun 2023 adalah sebanyak 74.421 desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator penilaian perkembangan pembangunan desa yang membagi kategori desa menjadi 5 kategori yaitu: 1) desa mandiri/desa semesta; 2) desa maju/desa pra-semesta; 3) desa berkembang/desa madya; 4) desa tertinggal/desa pra-madya; dan 5) desa tertinggal/desa pranata. Berdasarkan data IDM, perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan status kemajuan dan kemandirian desa menurut IDM

Kategori	2021	2022	2023
Mandiri	3269	6238	11456
Maju	15321	20249	23029
Berkembang	38083	33902	28751
Tertinggal	12635	9584	6803
Sangat tertinggal	5649	4982	4382

Sumber: https://kemendes.go.id/idm_data (diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan data perkembangan status desa menurut IDM tersebut diketahui bahwa desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal terus berkurang setiap tahunnya. Adapun jumlah desa berkembang juga mengalami penurunan. Sebaliknya jumlah desa dengan kategori maju dan mandiri terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa terjadi peningkatan yang baik dalam pembangunan desa. Sekalipun pembangunan desa mengalami peningkatan namun pembangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan masih mengalami kesenjangan (Ella dan

Andari, 2021). Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase penduduk miskin yang tinggal di perdesaan dan di perkotaan menurut Badan Pusat Statistik seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perkembangan tingkat kemiskinan perdesaan dan perkotaan di Indonesia.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (%)	
	Perkotaan	Perdesaan
2020	7,88	13,20
2021	7,38	12,82
2022	7,50	12,29
2023	7,29	12,22

Sumber: (BPS 2020, 2021, 2022, 2023).

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa meskipun persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan, namun jika dibandingkan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di perkotaan. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di kota, artinya kurang lebih hanya 46% penduduk tinggal di desa. Jumlah penduduk Indonesia lebih banyak yang tinggal di perkotaan namun tingkat kemiskinan lebih tinggi di perdesaan, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah kota dan desa masih tinggi dan patut diperhatikan oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan langkah yang solutif dan inovatif untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan melalui pemberdayaan potensi desa yaitu melalui program *smart village*. *Smart village* ini hadir dalam upaya merespon revolusi industri 4.0 yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa. Program *smart village* ini merupakan realisasi dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mana pemerintah berkomitmen untuk mengurangi 10.000 desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri sebanyak 5.000 desa.

Smart village merupakan pengembangan dari program *smart city* (Herdiana, 2019). Hal senada juga disampaikan oleh Santoso (2019) bahwa dimensi *smart village* diadopsi dari dimensi *smart city* yang meliputi 6 (enam) dimensi yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, dan *smart living*. *Smart governance* menjadi salah satu indikator yang paling penting dalam pelaksanaan *smart village* (Santoso, 2019; Rachmawati, 2018; Herdiana, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Pekon Sukanegeri Jaya hingga saat ini, Pekon Sukanegeri Jaya baru mengembangkan dua dari enam indikator *smart village* yaitu indikator *smart governance* dan *smart economy*. *Smart governance* adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas yaitu kemampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Cohen (2014) menyusun 3 (tiga) indikator *smart governance* yakni *enabling supply & demand side policy* (kebijakan), *ICT & E-Gov* (layanan publik berbasis TIK), dan *transparency & open data* (transparansi dan keterbukaan data).

Pekon Sukanegeri Jaya merupakan salah satu pekon *pilot project* pelaksanaan program *smart village* berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart village* di Provinsi Lampung Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan terpilihnya Pekon Sukanegeri Jaya menjadi *pilot project* pelaksanaan desa cerdas dikarenakan adanya kebutuhan dari pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya itu sendiri untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat pekon Sukanegeri Jaya. Jauh sebelum melaksanakan program desa cerdas sejak tahun 2015 Pekon Sukanegeri Jaya telah mengembangkan website desa namun pengelolannya belum maksimal. Selain itu sejak tahun 2016 Pekon Sukanegeri Jaya juga telah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan dan pelaporan anggaran keuangan pekon. Menindaklanjuti upaya pembangunan pekon dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada tahun 2018 Pekon Sukanegeri Jaya menyediakan internet gratis yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur pekon maupun masyarakat

Pekon Sukanegeri Jaya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diuraikan permasalahan yang ada di Pekon Sukanegeri Jaya yaitu adanya peluang menuju digitalisasi pemerintahan dengan ketersediaan internet pekon namun pengembangan sistem atau aplikasi yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal. Berdasarkan pertimbangan ini Pekon Sukanegeri Jaya antusias menyambut kesempatan sebagai lokus *pilot project* pelaksanaan program *smart village* tahun 2020 mewakili kecamatan Talang Padang.

2. Metode

Permasalahan pada penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan maksud menjelaskan hasil temuan dan kejadian di lapangan secara sistematis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait *smart governance* dalam konteks *smart village*. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles & Huberman yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2013) yaitu membandingkan dan memeriksa ulang data tentang terkait *smart governance* dalam konteks *smart village* yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini merupakan hasil analisis pada tiga indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya yaitu *enabling supply demand & side policy* (kebijakan), *ICT & E-Gov* (layanan publik berbasis TIK), dan *transparency & open data* (transparansi dan keterbukaan data). Hasil penelitian menemukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *smart governance* yaitu faktor internal dan eksternal.

Enabling Supply & Demand Side Policy

Dalam konteks penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya terdapat sejumlah kebijakan yang menjadi pedoman dan merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada desa/pekon. Kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Peraturan Gubernur Nomor Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Smart Village Lampung 2020-2024, Keputusan Gubernur Nomor G/228/II.02/HK/2020 tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart village* di Provinsi Lampung. Adapun Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebijakan yang sangat berkaitan dengan penerapan *smart governance*. Selain kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan *smart governance*, terdapat kebijakan yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pengembangan *smart governance* yaitu kebijakan yang mengatur tentang kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder seperti MoU kerjasama OpenDesa dalam menyediakan sistem *smart village* dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada duta-duta digital desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat 1 sampai 3 dalam konteks *smart governance* menjadi peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi lokal desa. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya yang telah memperbaiki kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi yang mudah dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui website desa dan sistem data penduduk yang terintegrasi sehingga memungkinkan masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya memperoleh pelayanan di kantor pekon tanpa harus membawa dokumen-dokumen. Pembangunan sarana dan prasarana Pekon Sukanegeri Jaya dalam menunjang keberlangsungan pelayanan publik berbasis teknologi dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang,

seperti kemudahan dalam mengakses informasi dengan adanya internet pekon, mengembangkan UMKM dengan memanfaatkan website pekon dan sosial media, serta adanya pelatihan teknologi berupa pelatihan komputer dan penggunaan internet yang diselenggarakan di perpustakaan Andan Ya. Masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan potensi lokal desa seperti pandai besi yang memproduksi alat-alat pertanian berkualitas tinggi, pengolahan hasil pertanian singkong dan talas menjadi produk keripik serta mengenalkan budaya Lampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya. Pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya mengelola berbagai potensi tersebut dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkannya melalui website dan sosial media pekon sebagai media promosi.

Pasal 86 Undang-Undang Desa mengatur tentang penyediaan perangkat jaringan informasi untuk meningkatkan pembangunan desa. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Open Desa yang merupakan salah satu *stakeholder* yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi sebagai penyedia aplikasi dan pendukung pelaksanaan *smart governance*. Dalam penerapannya di Pekon Sukanegeri Jaya Sistem Informasi Desa ini berupa website pekon *sukanegerijaya.id* yang didalamnya memuat informasi yang berkaitan dengan pembangunan pekon yang dapat diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/71/V.12/HK/2021 tentang 130 desa sasaran program *smart village* dari 2.435 desa yang ada di provinsi Lampung. Adapun hal ini didasarkan pada:

- a. Usulan pemerintah Kabupaten melalui Dinas/Badan Daerah Kabupaten yang mengurus Desa, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung. Usulan ini mempertimbangkan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan kategori desa mandiri dan maju.
- b. Balai Desa/Kantor Desa harus memiliki koneksi internet yang baik.
- c. Memiliki kelembagaan masyarakat yang potensial dalam implementasi program *smart village*.
- d. Diprioritaskan bagi desa yang telah memiliki website desa dan sudah menerapkan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi.
- e. Memenuhi kualifikasi minimal sarana dan prasarana desa dalam mendukung pelaksanaan *smart village*.

ICT & E-GOV

Menurut Santoso (2019), aspek pelayanan publik dan sosial yang merupakan salah satu dari tiga aspek dalam penerapan *smart governance* tersebut mencakup pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menemukan 2 (dua) aspek penting dalam penyelenggaraan ICT & E-Gov yaitu penyediaan infrastruktur berbasis TIK dan penyediaan layanan publik berbasis TIK.

Penyediaan Infrastruktur Berbasis TIK

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa/pekon yang ingin menerapkan program *smart village* diantaranya adalah tersedianya jaringan internet dan BUMDES yang aktif beroperasi. Jaringan internet menjadi hal yang sangat penting karena tidak mungkin *smart governance* dapat diterapkan tanpa adanya akses internet karena *smart governance* identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mana didalamnya harus ada internet. Infrastruktur TIK yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya yaitu WIFI, monitor, laptop, mesin pindai KTP, dan komputer. Setelah diluncurkannya program *smart village*, tata kelola pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya menjadi lebih teratur. WIFI gratis saat ini dikelola oleh pemerintah pekon dengan upaya pengawasan yang lebih baik, seperti yang ditemukan dari penjelasan Operator Pekon Sukanegeri Jaya bahwa akses internet gratis terbatas hanya hingga jam 7 malam untuk anak-anak. Masyarakat mendaftarkan NIK ke kantor pekon untuk mendapatkan akses internet gratis tersebut, jadi sistem secara otomatis akan menutup akses internet untuk anak-anak SD dan SMP tahun pada jam 7 malam dan akan dapat diakses kembali

keesokan harinya. Pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya membatasi akses internet pada jam 7 malam tersebut dengan pertimbangan di Pekon Sukanegeri Jaya anak-anak sudah memiliki handphone masing-masing, dikhawatirkan dengan adanya akses bebas internet mereka akan lebih memilih untuk bermain *game* hingga larut malam. Untuk masalah pekerjaan rumah (PR) dari sekolah, jika memang diperlukan mereka dapat menggunakan akses dari handphone orang tuanya sehingga bisa diawasi dan di kontrol.

Penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya juga meningkatkan pemberdayaan dan pengelolaan BUMDES. BUMDES Seat Jaya adalah nama BUMDES yang aktif beroperasi di Pekon Sukanegeri Jaya. Tidak hanya menghasilkan produk-produk unggulan, BUMDES Seat Jaya juga memfasilitasi masyarakat dalam kemudahan bertransaksi melalui agen BNI 46 di Pekon Sukanegeri Jaya.

Santoso (2020) menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur memberikan pengaruh yang besar dalam penerapan *smart governance* karena dengan adanya infrastruktur yang optimal *smart governance* dapat diterapkan dengan baik. Ella dan Andari (2021) dalam bukunya Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju menjelaskan bahwa salah satu langkah dalam pengembangan desa cerdas adalah dengan meningkatkan layanan dan infrastruktur desa dengan memanfaatkan TIK, misalnya pembangunan infrastruktur koneksi data lokal dan layanan *e-government*. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Kencono (2021) yang berjudul Penerapan *Smart Governance* dalam *Smart Village* yang menjelaskan bahwa pengadaan infrastruktur TIK dimulai dari pengadaan laptop kepada setiap pegawai yang bertujuan agar semua proses administrasi dapat menjadi lebih efektif dan efisien serta pengadaan tower internet dan wifi untuk menunjang perbaikan pengelolaan database dan pelayanan publik melalui pengembangan SID. Hal ini sejalan dengan upaya penyediaan infrastruktur di Pekon Sukanegeri Jaya yang dilakukan sebagai langkah awal dalam mewujudkan layanan publik berbasis TIK berupa pengadaan *smart tv*, komputer dan perangkat-perangkatnya untuk menunjang kegiatan administrasi, WIFI untuk mengakses internet, mesin EDC BNI untuk transaksi keuangan, dan mesin pindai KTP untuk memindai e-ktp penduduk yang memiliki kepentingan di kantor pekon.

Terkait infrastruktur berbasis TIK ini lebih lanjut Huda (2020) dalam penelitiannya tentang Pengembangan Desa Berbasis Digital menyampaikan bahwa penggunaan komputer maupun laptop dalam pengaplikasian administrasi merupakan sebuah langkah awal sebagai bentuk upaya pengembangan *smart village*. Huda menjelaskan bahwa titik tolak perubahan menuju desa cerdas dimulai dari perbaikan dan pengintegrasian administrasi, ekonomi, dan potensi desa lainnya dengan tujuan mendapatkan basis data yang terklasifikasi rapi, informatif, dan akurat. Tentu saja untuk mewujudkan integrasi data, dibutuhkan infrastruktur teknologi sebagai sarana penunjang dalam mengakses sistem informasi. Adapun penelitian Maharani (2021) tentang penerapan *smart governance* dalam *smart village* menemukan dampak positif dari adanya pembangunan infrastruktur TIK bagi perangkat pemerintahan dan masyarakat. Pengadaan infrastruktur TIK meningkatkan kinerja dan semangat kerja perangkat pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik menjadi lebih maksimal. Adapun masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi melalui fasilitas internet gratis sehingga meningkat pula literasi digital dikalangan masyarakat untuk mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi dan budaya.

Santoso (2019) dalam penelitiannya Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0 menyatakan bahwa terdapat dua langkah dalam implementasi *smart governance* yaitu pengadaan infrastruktur penunjang baik fisik dan nonfisik kemudian pengembangan dan pemanfaatan *software*. Serupa dengan tahap awal implementasi *smart governance*, Pekon Sukanegeri Jaya melakukan pengadaan tower internet, wifi, pengadaan perangkat keras laptop dan komputer untuk menunjang operasional pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya. Selain itu fasilitas laptop yang diadakan untuk pegawai Pekon Sukanegeri Jaya bertujuan untuk mengenalkan TIK sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penyediaan Layanan Publik berbasis TIK

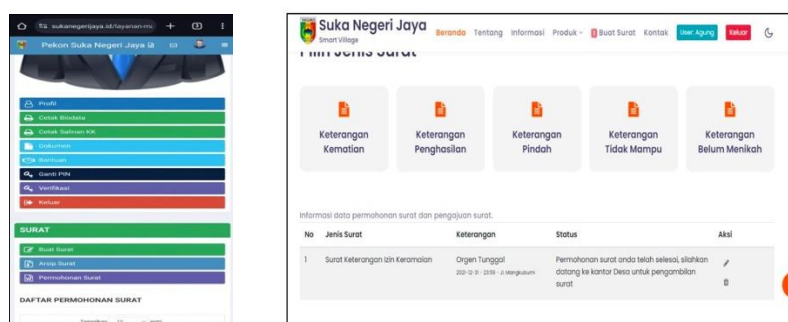
Pelayanan publik di Pekon Sukanegeri Jaya sudah berbasis sistem informasi dengan pelayanan digital melalui *website sukanegerijaya.id*. Melalui website desa ini pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya menyediakan layanan mandiri antarlain sebagai berikut.

Layanan administrasi

Website Pekon Sukanegeri Jaya memanfaatkan sistem OpenSID yang didalamnya terdapat administrasi pelayanan umum diantaranya administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, layanan publik mandiri. *Website* Pekon Sukanegeri Jaya memuat database desa yang didalamnya terdapat data kependudukan dan potensi desa. Masyarakat dapat mengajukan layanan mandiri berupa surat pengantar kartu tanda penduduk (KTP), pengantar SKCK, keterangan kematian, keterangan kelahiran, keterangan pindah (pengantar pindah penduduk, pengantar penduduk masuk), keterangan belum menikah, pengantar kesehatan, pengantar surat keterangan tidak mampu (SKTM). Di Pekon Sukanegeri Jaya terdapat alat pemindai KTP yang memudahkan pelayanan administrasi secara langsung di kantor pekon. Adanya alat pemindai E-KTP ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di kantor tanpa harus membawa surat-surat atau dokumen karena data penduduk Pekon Sukanegeri Jaya telah terintegrasi ke dalam sistem *smart village*. Data yang telah terintegrasi di sistem ini juga mempermudah aparat pekon untuk mencetak surat yang diajukan oleh masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Agar dapat mengakses pelayanan mandiri, warga Pekon Sukanegeri Jaya harus mendapatkan PIN yang dapat dibuat melalui kantor pekon dengan tata cara sebagai berikut.

- Pelayanan mandiri hanya bisa dilakukan khusus untuk masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya saja.
- Warga/pemohon layanan mandiri datang ke kantor pekon dengan membawa E-KTP dan fotokopi kartu keluarga (KK) serta pengantar RT (Pengantar RT untuk membuat PIN Layanan Mandiri).
- Pemohon mengajukan permohonan akun untuk login ke bagian pelayanan/operator pelayanan.
- Pemohon akan diberikan PIN, simpan nomor PIN yang diberikan oleh Operator Pelayanan.
- PIN digunakan untuk masuk/login di website <https://sukanegerijaya.id/> kemudian memilih Layanan Mandiri.
- Masukkan NIK sebagai username dan password (PIN) yang telah diterima.
- Setelah login, warga/pemohon dapat memilih layanan surat yang diperlukan.



Gambar 1. Tampilan layanan *permohonan surat*
Sumber: Website Pekon Sukanegeri Jaya (diakses 2024)

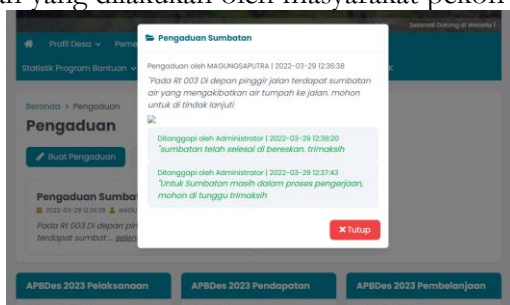
Layanan keuangan BNI 46 dan CMS (Cash Management System)

Agen BNI 46 dikelola oleh BUMDES Pekon Sukanegeri Jaya disediakan agar masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan. Melalui BNI 46 ini masyarakat dapat membeli pulsa, paket data, membayar tagihan listrik dan pembayaran BPJS. Pekon Sukanegeri Jaya telah menjalin kerjasama dengan Bank Lampung dalam program *cash management system* (CSM)

yaitu program yang merupakan solusi layanan Perbankan guna mempermudah transaksi keuangan. CSM ini hampir sama dengan sistem SMS Banking, hanya saja aplikasi ini hanya diperuntukkan untuk transaksi keuangan Lembaga, Perusahaan, dan Instansi Pemerintah. Adanya program CSM ini mempermudah Kaur Keuangan Pekon Sukanegeri Jaya dalam melakukan transaksi non tunai tanpa harus datang dan mengantri di bank. Transaksi dapat dilakukan dimana saja sepanjang tersedianya jaringan internet. Melalui CMS ini Kaur Keuangan Pekon Sukanegeri Jaya dapat memonitoring mutasi transaksi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan dana, setoran pajak, pencetakan rekening koran yang digunakan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Terkait pengelolaan anggaran ini Pekon Sukanegeri telah menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES) online sejak tahun 2016. Kaur Perencanaan yang bertanggungjawab mengelola sistem ini.

Layanan Aduan Berbasis TIK

Salah satu indikator pelayanan publik dalam *smart governance* adalah ketersediaan layanan aduan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Layanan aduan ini memungkinkan masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya lebih mudah dalam memberikan umpan balik atas kebijakan atau kegiatan pemerintah pekan dalam bentuk respon aktif atau kritik dan saran. Kehadiran *smart governance* yang didalamnya memprakarsai adanya layanan aduan berbasis online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan berpartisipasi dalam kebijakan Pekon Sukanegeri Jaya. Sarana dalam menyampaikan ide, gagasan, kritik dan saran oleh masyarakat adalah melalui media sosial (Facebook, Instagram, Whatsapp) dan juga fitur Layanan Aduan yang terdapat di *website* pekan. Berikut adalah contoh aduan yang dilakukan oleh masyarakat pekan Sukanegeri di *website* pekan.



Gambar 2. Tampilan Layanan Aduan

Sumber: Website Pekon Sukanegeri Jaya (diakses 2024).

Ketersediaan internet gratis di Pekon Sukanegeri menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung layanan aduan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat mengakses *website* desa atau sosial media tanpa ada keluhan tidak memiliki data internet seluler atau alasan lainnya. Melalui sosial media, masyarakat dapat langsung memberikan kritik dan saran melalui chat pribadi, DM, atau langsung melalui kolom komentar. Adapun melalui *website* desa masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya dapat membuat pengaduan dengan mengisi NIK, nama, email, telepon, judul aduan, isi aduan, dan unggah foto. Bagian penting yang harus diisi adalah nama, judul aduan, dan isi pengaduan. Masyarakat dapat mengunggah foto sebagai sumber penunjang aduan.

Maharani (2021) menyatakan bahwa salah satu indikator dalam penerapan *smart governance* adalah ketersediaan layanan aduan berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat desa. Kemudahan ini juga dirasakan oleh masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya dengan adanya layanan aduan yang dapat diakses melalui *website* pekan maupun pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Penelitian tentang layanan aduan berbasis TIK telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian oleh Silaban (2023) yang berjudul Efektivitas Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Silaban (2023) menyatakan bahwa adanya aplikasi Lapor ini dirasakan manfaatnya oleh para pengguna yakni setiap permasalahan yang

dialami dapat langsung diadukan melalui Laport, pengguna tidak perlu datang ke dinas dalam melakukan pengaduan. Hal ini selaras dengan layanan aduan berbasis TIK yang ada di Pekon Sukanegeri Jaya. Melalui platform *online* (website dan media sosial) masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya dapat menyampaikan ide, gagasan, kritik dan saran terhadap kebijakan dan pembangunan yang ada di Pekon Sukanegeri Jaya. Melalui *website* desa masyarakat dapat melakukan pengaduan pada fitur Layanan Aduan yang terdapat pada salah satu menu di *website* desa. Adapun melalui media sosial masyarakat diberi kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya pada kolom komentar atau pesan pribadi. Melalui layanan aduan ini dapat mempermudah hubungan masyarakat dengan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Layanan ini memungkinkan masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya lebih cepat dalam menyampaikan dan memperoleh tanggapan dari pemerintah pekon.

Transparency & Open Data

Transparency & open data dapat diartikan dengan penyediaan data yang terbuka dan transparan. Indikator ini menjelaskan tentang adanya keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan data dalam mewujudkan *smart governance*. Transparansi berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya dalam menyediakan informasi publik, baik tentang anggaran dana desa dan agenda pemerintah desa serta transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan desa.

Transparansi Dalam Informasi Anggaran Dan Agenda Pemerintah Desa

Salah satu sarana teknologi informasi komunikasi yang dimanfaatkan oleh Pekon Sukanegeri Jaya untuk meningkatkan transparansi publik adalah *website* desa yang mana anggaran dana desa dan kegiatan pembangunan disebarluaskan agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya melalui *website sukanegerijaya.id*.



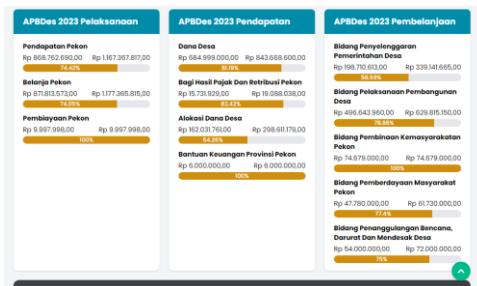
Gambar 1. Tampilan arsip berita pekon

Sumber: Website Pekon Sukanegeri Jaya (diakses 2024)

Tidak hanya anggaran dan kegiatan pembangunan pekon, *website* tersebut juga secara spesifik menampilkan data-data kependudukan dan program-program pekon. Di *website* Pekon Sukanegeri Jaya ditampilkan penerima bantuan sehingga lebih terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Melalui *website* tersebut dapat dilihat nama-nama masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya yang menjadi penerima program bantuan.

Terdapat dua cara yang dilakukan oleh Pekon Sukanegeri Jaya terkait transparansi anggaran dana desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pekon Sukanegeri Jaya, yaitu dengan cara online dan offline. Transparansi melalui media online dilakukan melalui *website* desa dan sosial media sedangkan transparansi yang dilakukan secara offline/manual yaitu dengan mencetak banner anggaran dana desa dan menempatkannya di area yang terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat disini tidak terbatas hanya masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya saja, tapi

juga pihak-pihak yang berkepentingan, seperti wartawan, tim pengawas dari kecamatan dan dinas, dan pihak-pihak lain.



Gambar 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Sukanegeri Jaya
Sumber: Website Pekon Sukanegeri Jaya (diakses 2024).

Nugroho (2023) dalam penelitiannya tentang Analisis Penerapan Smart Governance dalam Mewujudkan Smart City di Kota Semarang mendefinisikan open data dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Semarang mewujudkannya dengan menyediakan portal open data yaitu <https://semarangkota.go.id/>. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya yang berkomitmen untuk selalu mengupayakan transparansi pengelolaan dana desa Pekon Sukanegeri Jaya melalui *website* desa <https://sukanegerijaya.id/> dan sosial media berupa Facebook, Instagram dan grup Whatsapp yang dikelola oleh pemerintah pekon. Pengelolaan dana desa Pekon Sukanegeri Jaya adalah dengan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang mana aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi *Smart village*.

Tujuan dari transparansi adalah agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memantau informasi tentang kegiatan pemerintahan (Maharani & Kencono, 2021). Hal ini selaras dengan keberadaan *website* Pekon Sukanegeri Jaya yang memuat fitur pengelolaan konten informasi berdasarkan beberapa kategori menu, antara lain berita, agenda, produk hukum, perencanaan dan penganggaran, laporan, potensi dan usaha, serta layanan mandiri. Menu kategori tersebut memuat artikel yang dilengkapi dengan foto dan lampiran dokumen sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi seperti syarat administrasi, jadwal agenda pekon, anggaran keuangan pekon, hingga berita harian Pekon Sukanegeri Jaya di *website* tersebut. *Website* tersebut juga dimanfaatkan oleh Pekon Sukanegeri Jaya untuk mempublikasikan informasi-informasi mengenai potensi lokal desa yang dapat digunakan sebagai sarana promosi ke pihak-pihak luar atau para pemangku kepentingan. Adanya *website* tersebut juga meningkatkan kualitas dan prestasi Pekon Sukanegeri Jaya sehingga mendapat perhatian dari pemerintah dan stakeholder. Salah satu contohnya adalah predikat DESA CANTIUK atau Desa Cinta Statistik yang diraih oleh Pekon Sukanegeri Jaya karena data statistik penduduk dan potensi lokal pekon yang secara rapi terklasifikasi dan dipublikasikan di *website* pekon.

Transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan desa

Open data dalam keterkaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan desa. Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Pekon Sukanegeri Jaya berupaya untuk menerapkan transparansi sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai budaya dan etos kerja masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya. Proses perencanaan pembangunan Pekon Sukanegeri Jaya dilakukan secara berjenjang. Berdasarkan penjelasan oleh Pekon Sukanegeri Jaya dapat ditemukan bahwa proses perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah RT kemudian musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Pekon Sukanegeri Jaya memiliki 5 RT dan 2 Dusun, yang artinya musyawarah dusun dilaksanakan dua kali, yaitu musyawarah dusun 1 dan musyawarah dusun 2. Pada tingkat dusun, masyarakat dapat menyuarakan seluruh aspirasinya untuk kemudian aspirasi atau usulan

tersebut akan diangkat dan dibahas di musdes atau musrenbang. Partisipasi masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dilakukan dengan menguraikan permasalahan dan memberikan usulan yang beragam.

Masyarakat diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengusulkan atau mengajukan berbagai kebutuhan dalam banyak bidang, seperti pembangunan fisik berupa pembangunan jalan, perbaikan pos kamling, pembuatan drainase, dan lain-lain. Saran dan usulan masyarakat tersebut seluruhnya ditampung untuk kemudian akan dibahas pada musyawarah desa atau musrenbang pekon untuk pertimbangan dan ditentukan skala prioritas pembangunannya. Partisipasi muli mekhanai Pekon Sukanegeri Jaya dalam pembangunan desa ditunjukkan melalui inisiatif dalam berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Prestasi remaja Pekon Sukanegeri Jaya dalam kegiatan lomba vlog peran remaja cegah covid 19 ini patut diapresiasi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pekon Sukanegeri Jaya bahwa pemerintah pekon sangat mendukung semua kegiatan positif yang ada di pekon. Bentuk partisipasi muli mekhanai Pekon Sukanegeri Jaya lainnya adalah mengembangkan dan melestarikan budaya Lampung serta mempromosikannya melalui media sosial. Melalui sanggar SEANDANAN, muli mekhanai Pekon Sukanegeri Jaya melestarikan adat budaya Lampung melalui tari tradisional, pernak pernik khas Lampung, pelatihan wayak pantun Lampung, cover lagu-lagu Lampung, kreasi film pendek berbahasa Lampung, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan-kegiatan sanggar SEANDANAN ini disebar luaskan melalui Facebook Muli Mekhanai Pekon Sukanegeri Jaya dan channel youtube Andan Ya TV.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shabrinawati dan Yuliasuti tentang Implementasi *Smart Governance* berdasarkan *Smart village*, dalam penelitian ini pengukuran keberhasilan pengelolaan dana desa dikategorikan menjadi 3 kategori, yakni: (1) dikategorikan baik apabila seluruh laporan keuangan desa mudah diakses secara online dan dana desa dialokasikan untuk seluruh bentuk kegiatan desa, (2) dikategorikan sedang apabila laporan keuangan desa dapat diakses secara online meskipun ada juga yang masih menggunakan sistem offline (melalui poster, spanduk, pamflet, dan lain sebagainya) dan dana desa dialokasikan untuk satu atau dua jenis kegiatan desa, dan (3) dikategorikan buruk apabila laporan keuangan desa hanya dapat diakses oleh masyarakat secara offline (melalui poster, spanduk, pamflet, dan lain sebagainya) dan dana desa dialokasikan untuk satu atau dua bentuk kegiatan desa.

Berdasarkan kategori tersebut pengelolaan anggaran Pekon Sukanegeri Jaya sudah baik. Bentuk transparansi informasi anggaran Pekon Sukanegeri Jaya menggunakan konsep *smart governance* adalah melalui *website* pekon dan sosial media (Facebook, Instagram, dan grup Whatsapp). Melalui *website* pekon, anggaran dapat diakses melalui menu keuangan. Didalam *website* tersebut ditampilkan pelaksanaan APBDes dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Masyarakat dapat memantau pelaksanaan, pendapatan dan pembelanjaan anggaran dana pekon melalui *website* pekon tersebut. Selain itu, Pekon Sukanegeri Jaya juga memanfaatkan sosial media berupa Facebook, Instagram dan juga grup Whatsapp untuk menyebarkan jumlah anggaran dana pekon sehingga informasi ini tersebar luas tidak hanya untuk masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya, tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Pada tahun 2023, Pekon Sukanegeri Jaya memperoleh penghargaan sebagai juara pertama pekon yang memiliki manajemen perencanaan dan pengelolaan APBPekon terbaik tingkat Kabupaten Tanggamus.

Transparansi agenda pemerintahan pekon juga disebar melalui platform yang sama yaitu *website* pekon, Facebook, Instagram dan grup Whatsapp. Pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya berupaya untuk konsisten mengunggah berita terbaru tentang pekon, baik tentang kebijakan, kegiatan pemerintahan, pembangunan pekon, dan perubahan persyaratan dalam mengajukan surat tertentu. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya membawa dampak positif antara lain penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui adanya pengawasan publik. Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Pekon Sukanegeri Jaya akan meningkat seiring dengan keterbukaan dan aparat pekon yang bertanggung jawab.

Huda (2020) menganalisa partisipasi di desa Talagasari berdasarkan Cohen & Uphoff yang membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan yaitu tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan kegiatan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi. Berdasarkan tahapan tersebut dapat dijabarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan di Pekon Sukanegeri Jaya yaitu sebagai berikut.

Pada tahap pengambilan keputusan, partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon Sukanegeri Jaya diwujudkan melalui keikutsertaan warga dalam rapat dan musyawarah untuk merencanakan kegiatan pembangunan pekon. Rapat dan musyawarah yang dilakukan antara lain musyawarah dusun yang dilakukan di dusun 1 dan dusun 2. Selanjutnya musyawarah desa atau musyawarah perencanaan dan pembangunan pekon (musrenbang). Melalui musyawarah ini pemerintah pekon menjangkau aspirasi dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun skala prioritas pembangunan pekon. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung dalam rapat atau melalui media sosial untuk selanjutnya dibahas dalam rapat tersebut.

Tahap pelaksanaan pembangunan desa masyarakat berpartisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program (Huda, 2020). Masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya dapat menyumbangkan pemikiran baik secara langsung dalam rapat desa maupun secara tidak langsung melalui media sosial. Masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk sumbangan materi seperti yang digunakan untuk pembangunan masjid Al-Istighfar yang ada di Pekon Sukanegeri Jaya. Adapun partisipasi dalam bentuk tindakan sebagai anggota program, masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti gotong royong, peserta perlombaan pekon seperti lomba perpustakaan dan BUMDES. Partisipasi dalam teknologi informasi dan komunikasi yang paling mudah dijumpai adalah kegiatan muli mekhanai Sukanegeri Jaya dalam melestarikan budaya dan mempublikasikannya di platform online sehingga mampu menjangkau banyak pihak.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Smart Governance*

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya adalah sebagai berikut.

Faktor Internal Pendanaan.

Faktor penting untuk menilai kapabilitas pendanaan yaitu memiliki dukungan yang memadai untuk melaksanakan semua aktivitas (Kusumasari, 2014). Terkait hal ini Pekon Sukanegeri Jaya memiliki sumber pendapatan yang berasal dari dana desa, hasil usaha pekon, bagi hasil pajak dan retribusi dan alokasi dana pekon. Untuk mendukung keberlangsungan program *smart governance*, Pekon Sukanegeri Jaya menggunakan anggaran dana desa untuk keperluan perpanjangan *hosting* dan domain *website* pekon serta gaji pegawai yang mengelola *smart village*. Pada tahap awal pelaksanaan *smart governance* Pekon Sukanegeri Jaya mendapat dana stimulan dari Gubernur Provinsi Lampung sebesar 30 juta. Hal ini selaras dengan penelitian Maharani & Kencono (2021) yang berjudul Penerapan *Smart governance* dalam *Smart Village di Kalurahan Dlingo Kabupaten Bantul*, yang menjelaskan bahwa pendanaan awal penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yang direalisasikan dalam berbagai pengadaan infrastruktur TIK serta insentif bagi staf bidang TIK. Kemudian setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, muncul program Dana Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu desa dalam mengatasi ketertinggalannya. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Santoso (2019) dalam bukunya *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*, yang mengungkapkan bahwa pendanaan program *smart governance* berasal dari ADD yang digunakan untuk pengadaan laptop, pemasangan tower internet, dan insentif bagi staf bidang TIK. Pada bab *lesson learned* kasus desa cerdas *smart governance* di Desa Dlingo, Santoso menjelaskan bahwa diawal program pemerintah kabupaten Bantul turut membantu pengembangan *smart governance*.

Faktor Sumber Daya Manusia.

Kusumasari (2014) menyatakan bahwa faktor penting untuk menilai kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yaitu memiliki sumber daya yang cukup yang disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas. Nugraha (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *E-Government* dalam Pelayanan publik mengungkapkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan *e-government*. Lebih lanjut penelitian ini menyebutkan bahwa keterbatasan SDM dengan *background* IT dapat disiasati dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital para pegawainya. Hal tersebut juga menjadi tantangan Pekon Sukanegeri Jaya pada masa awal penerapan *smart governance*. Namun untuk saat ini SDM aparatur Pekon Sukanegeri Jaya dapat dikatakan sudah melek teknologi, masing-masing kasi dan staf sudah dapat mengoperasikan komputer serta bertanggung jawab terhadap aplikasi atau sistem yang digunakan untuk menunjang tugas-tugas mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugraha (2018) yang telah dijelaskan sebelumnya, Pekon Sukanegeri Jaya gencar melakukan pelatihan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas aparatur pekon melalui berbagai bimtek dan pelatihan. Adapun SDM masyarakat dapat dikatakan masih kurang memahami program *smart governance*. Meskipun 70% masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya sudah mampu menggunakan gadget, namun antusias mereka dalam menerima dan menerapkan program *smart governance* khususnya dalam bidang pelayanan belum maksimal. Masyarakat masih banyak yang tetap datang ke kantor untuk membuat surat meskipun pemerintah pekon sudah sering memberikan sosialisasi dan himbuan kepada masyarakat untuk memanfaatkan fitur Layanan Mandiri yang dapat diakses di *website* Pekon Sukanegeri Jaya.

Faktor Eksternal Kerjasama

Kemampuan membangun jejaring dan kerjasama merupakan faktor kunci dalam membangun desa cerdas (Laporan Isu Strategis Pengembangan Model Desa Cerdas, 2018). Melalui kerjasama akan membantu proses-proses perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan desa. Jejaring/kolaborasi yang dilakukan oleh Pekon Sukanegeri Jaya merujuk pada konsep *Pentahelix* yang merupakan bentuk kolaborasi dengan para stakeholder yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan media. Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Perkumpulan Desa Digital Terbuka (OpenDesa) dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten, 2 kota, 129 kecamatan, dan 2.435 desa serta 205 kelurahan, menjadi tantangan untuk bisa terhubung satu sama lain melalui data yang terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih progresif dan pelayanan publik yang optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam program *smart village*. Sejauh ini pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas PMDT telah berkolaborasi dengan sejumlah dinas dan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di provinsi Lampung serta perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang dibutuhkan untuk mewujudkan *smart village*. Hal ini sejalan dengan upaya Pekon Sukanegeri Jaya bekerjasama dengan pemerintah antara lain dengan Dinas PMDTT, pemerintah provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Tanggamus, Dinas Dukcapil, BPS Tanggamus, Dinas Perindustrian Kabupaten Damas Raya Provinsi Sumatera Barat, Perpustakaan Nasional RI, dan Perpustakaan Provinsi Lampung. Kerjasama dengan komunitas, pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya berkolaborasi dengan CRI atau *Combine Resource Institution* yang berperan dalam menyediakan sistem OpenSID yang digunakan oleh Pekon Sukanegeri Jaya untuk mengelola *website* pekon. Sebagai penyedia sistem, CRI OpenSID juga berperan dalam pelatihan dan mentoring penggunaan sistem dan aplikasi dalam mendukung penerapan *smart governance*. Pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya juga berkolaborasi dengan para akademisi melalui

program kegiatan pengabdian dan KKN mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Lampung, UIN Raden Intan Lampung, dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Partisipasi masyarakat

Pemerintah desa perlu mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Santoso, 2019). Hal ini karena partisipasi masyarakat akan menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan Isu Strategis Pengembangan Model *Smart village* (2018) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar terlibat, namun memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik di desa. Oktarina, dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Smart Governance in Indonesian Village Towards SDGs Achievement* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan *smart governance* karena masyarakat sebagai penerima manfaat dari program pemerintah memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang mereka butuhkan serta kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi masyarakat yang dimaksud setidaknya tampak dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan atau program desa. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti bahwa masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan pengambilan keputusan kebijakan melalui musyawarah-musyawarah desa. Yuli (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Smart Village Nusantara dalam Perspektif Smart Governance di Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karang Anyar*, menjelaskan bahwa kendala utama dalam masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif adalah karena belum mengetahui terkait website desa kemuning yang disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi dari kelompok informasi masyarakat (KIM) dalam memberikan edukasi tentang digitalisasi di desa Kemuning. Berbeda dengan hasil temuan peneliti tentang partisipasi masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya. Meskipun masyarakat pekon Sukanegeri sudah aktif berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan, namun dalam penerapan *smart governance* khususnya dalam bidang layanan publik, partisipasi masyarakat masih kurang dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang datang ke kantor untuk membuat surat padahal pemerintah pekon sudah menghimbau bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan surat dari rumah melalui *website* desa. Ternyata penyebab hal ini bukan dikarenakan masyarakat tidak mampu menggunakan gadget atau kurangnya sosialisasi tentang *smart governance*, tetapi sebagian besar masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya masih memiliki pola pikir bahwa lebih memuaskan untuk datang ke kantor dan langsung mendapat pelayanan secara langsung. Fenomena ini terjadi karena masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya berpikir bahwa pembuatan surat di kantor pekon lebih mudah praktis karena tidak seperti dahulu, dengan adanya scanner e-ktp dan data yang terintegrasi dalam satu sistem *smart village* sekarang masyarakat tidak perlu membawa dokumen ke kantor pekon untuk mendapatkan pelayanan melainkan cukup membawa KTP saja. Meski begitu, aparat Pekon Sukanegeri Jaya tetap berharap akan lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan mandiri dan akan terus melakukan sosialisasi tentang hal ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian, ditemukan bahwa aspek-aspek penting yang menjadi fokus analisis, yaitu *enabling supply & demand side policy, transparency & open data*, dan *ICT & E-Gov*, telah terpenuhi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya sudah berjalan dengan baik dalam konteks digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Terdapat kebijakan yang jelas yang mengatur dan mendukung pelaksanaan *smart governance*. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis TIK juga sudah cukup lengkap dan dapat dioperasikan dengan baik. Adapun pelayanan publik sudah berbasis online melalui Layanan Mandiri yang dapat diakses melalui *website sukanegerijaya.id* yang mana masyarakat dapat membuat permohonan berbagai jenis

surat tanpa harus datang ke kantor. Pelayanan secara langsung di kantor pun sudah efektif dan efisien dengan memanfaatkan alat *scan* E-KTP sehingga masyarakat tidak perlu membawa dokumen tertentu untuk mendapatkan pelayanan. Data penduduk yang telah terintegrasi dalam satu sistem aplikasi *smart village* juga telah memudahkan proses pelayanan publik.

Pada indikator transparansi, Pekon Sukanegeri Jaya memanfaatkan *website* dan sosial media Facebook, Instagram, dan grup Whatsapp untuk menyebarkan berbagai informasi tentang pekon. Dalam hal transparansi anggaran, masyarakat dapat mengakses *website* desa dan pada bagian menu keuangan dapat dilihat pendapatan dan pengalokasian dana pekon. Selain memuat informasi anggaran keuangan, *website* tersebut juga memuat statistik penduduk dan nama-nama penerima program bantuan pemerintah sehingga seluruh pihak dapat memantau informasi tersebut. Transparansi agenda pekon juga dapat diakses melalui *website* dan sosial media Pekon Sukanegeri Jaya. Masyarakat dapat memantau kinerja aparat pekon, agenda pembangunan pekon, agenda penting untuk masyarakat, baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah terlaksana. Selain itu, masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya juga dapat mengakses layanan aduan di *website* desa untuk menyampaikan keluhan atau kritik dan masukan untuk pemerintah pekon.

Dalam hal pengambilan kebijakan, masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya berpartisipasi dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa baik secara langsung atau menyampaikan pemikirannya melalui media sosial Pekon Sukanegeri Jaya. Hal ini menandakan bahwa transparansi dan keterbukaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain dalam hal kebijakan, masyarakat juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa baik para remaja (*muli mekhanai*) hingga orang dewasa. Salah satu bukti partisipasi warga Pekon Sukanegeri Jaya adalah prestasi yang diraih oleh Pekon Sukanegeri Jaya dalam perlombaan dalam lingkup kecamatan, kabupaten, hingga provinsi yang melibatkan masyarakat pekon.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *smart village* di Pekon Sukanegeri Jaya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendanaan dan kualitas SDM, adapun faktor eksternal meliputi faktor kerjasama dan partisipasi masyarakat. Pada faktor pendanaan, Pekon Sukanegeri Jaya mengalokasikan anggaran dana pekon (APBDes) untuk menunjang keberlanjutan *smart governance*. Faktor SDM berkaitan dengan kemampuan aparat dan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi untuk menerapkan *smart governance*. Aparat Pekon Sukanegeri Jaya sudah cukup mampu dalam mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi dalam menunjang tugas-tugasnya. Adapun masyarakat Pekon Sukanegeri Jaya sebagian besar sudah mampu menggunakan gadget untuk mengakses informasi tentang pekon. Kerjasama dilakukan oleh pemerintah Pekon Sukanegeri Jaya dengan pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan maupun dinas-dinas. Adapun kerjasama bersama komunitas dilakukan dengan CRI OpenDesa dalam menyediakan sistem aplikasi *smart village*, dan kerjasama dengan akademisi melalui program pengabdian masyarakat dan KKN mahasiswa dari berbagai universitas. Partisipasi masyarakat dalam penerapan *smart governance* di Pekon Sukanegeri Jaya masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal keterlibatan memanfaatkan layanan berbasis TIK. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang acuh dan apatis terhadap kebijakan pemerintah pekon terkait layanan mandiri dan pemanfaatan teknologi.

Acknowledgment

Terima kasih kami ucapkan kepada pembimbing dan seluruh Civitas Akademika Universitas Lampung atas selesainya artikel kami, karena selama ini telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tulisan ini.

References

- Andari, R. N., & Ella, S. (2021). *Model Desa Cerdas Untuk Membangun Indonesia Maju* (1 ed.). Syiah Kuala University Press.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeath*, 4(2), 68. <https://doi.org/10.31764/jpe.v4i2.1000>
- Damayanthi, C. D., & Nugroho, A. A. (2023). Analisis Penerapan Smart Governance Dalam Mewujudkan Smart City Di Kota Semarang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 77-83.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (1 ed.). Bumi Aksara.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep *Smart village* Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the *Smart village* Concept for Indonesian Villages). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16>
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang). 6.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah. Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maharani, E. N., & Kencono, D. S. (2021). Penerapan Smart Governance Dalam *Smart Village* Di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 25–38. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.14472>.
- Nugraha, Joko Tri. (2018). *E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Vol 2, No. 1, April 2018. Universitas Tidar.
- Rachmawati, R. (2018). Pengembangan *Smart village* untuk Penguatan Smart City dan Smart Regency. *Jurnal Sistem Cerdas*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.37396/jsc.v1i2.9>
- Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan Dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*. Center for Digital Society.
- Shabrinawati, A., & Yuliasuti, N. (2020). Implementasi Smart Governance Berdasarkan Konsep *Smart Village*. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 21(2), 141. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.3020>
- Silaban, Y. (2023). Efektivitas Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. *Journal Of Science and Social Research*, 6(1), 233-240.
- Yanti, D. Y. (2024). Pelaksanaan Smart Village Nusantara Dalam Perspektif Smart Governance Di Desa Kemuning Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 748-764.